



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 (0380) 831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 304 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT*  
*PROGRAM INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT*  
*OF IRRIGATION PROGRAM* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dalam sistim irigasi, baik sistim irigasi yang merupakan kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan Kabupaten yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran koordinasi antar instansi di tingkat provinsi terkait pelaksanaan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Tim Provincial Project Management Unit Program Integrated Participatory and Management of Irrigation Program* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

**Memperhatikan** : Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PHD-014/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang kegiatan *Integrated Participatory and Management of Irrigation Program*;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim *Provincial Project Management Unit Program Integrated Participatory and Management of Irrigation Program* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- mengoordinir secara teknis arahan dan kebijakan Gubernur dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan program;
  - mengoordinir keterpaduan program antar instansi pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten; dan
  - *mereview* Annual Work Plane (AWP) Provinsi dan Kabupaten bersama dengan Provincial Project Implementations Unit (PPIU), Kabupaten Project Management Unit (KPMU) dan Kabupaten Project Implementations Unit (KPIU), melaksanakan koordinasi dengan National Project Management Unit (NPMU), National Project Implementations (NPIU) dan KPMU untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 10 SEPTEMBER 2018

*[Signature]*  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*[Signature]*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 304 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018**

SUSUNAN TIM *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT*  
*PROGRAM INTEGRATED PARTICIPATORY AND MANAGEMENT OF IRRIGATION*  
PROGRAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Tim.
4	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir secara Teknis arahan dan kebijakan Gubernur dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Perumusan kebijakan Provinsi tentang program <i>Integrated Participatory and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> di Provinsi NTT.
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten program <i>Integrated Participatory and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> di Provinsi NTT.
6	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten program <i>Integrated Participatory and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> di Provinsi NTT.
7	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten program <i>Integrated Participatory and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> di Provinsi NTT.

8	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu sekretaris dan Ketua dalam mereview AWP provinsi dan kabupaten bersama dengan PPIU, KPMU, dan KPIU, melaksanakan koordinasi dengan NPMU, NPIU dan KPMU, menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program <i>Integrated Participatory and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> di Provinsi NTT.
9	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu sekretaris dan Ketua dalam mereview AWP provinsi dan kabupaten bersama dengan PPIU, KPMU, dan KPIU, melaksanakan koordinasi dengan NPMU, NPIU dan KPMU, menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program <i>Integrated Participatory and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> di Provinsi NTT.
10	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan <i>review</i> dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana on grating sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/ <i>review</i> umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
11	Sekretaris Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir secara Teknis arahan dan kebijakan Gubernur, sebagai penanggung jawab Tim PPMU, dan Memberikan arahan umum serta menetapkan berbagai aturan tentang pelaksanaan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Program <i>Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program</i> di Prov NTT.

22

12	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Mengumpul kan dan mengkonsolidasikan program fisik dan keuangan dari seluruh program tingkat provinsi dan kabupaten, mengumpul dan mereview AWP, membantu megkonsolidasi laporan pengelolaan keuangan FMR untuk keseluruhan program (provinsi dan kabupaten) pada pelaksanaan Program <i>Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation</i> Program di Prov NTT. ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
13	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
14	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Mengumpul kan dan mengkonsolidasikan program fisik dan keuangan dari seluruh program tingkat provinsi dan kabupaten, mengumpul dan mereview AWP, membantu megkonsolidasi laporan pengelolaan keuangan FMR untuk keseluruhan program (provinsi dan kabupaten) pada pelaksanaan Program <i>Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation</i> Program di Prov NTT. ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
15	Kepala Bidang Anggaran pada Badan PPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.

nc

16	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan PPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
17	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
18	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
19	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.



20	Kasubid Infrastruktur pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
21	Kasubid TRLH Bidang IPW pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
22	Kasubid PWPKP Bidang IPW pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
23	Kasubag PDE pada Bappeda Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.

24	Kasubag Kepeg. dan Umum pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
25	Kasubag Pertanian pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
26	Kasubid Pengendalian Monev Pelaporan APBD Provinsi Kabupaten Kota pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
27	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan PPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.

28	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
29	Fiktor Bidjae, A. Mf/ Bendahara pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
30	Jacobus B Botoor, SE/ Staf Bid IPW pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
31	Weltin Juniati, SE/ Staf pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.

32	Stefanus Bullu, SE/ Staf pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
33	Gaspar Enga, SE, M.si./ Staf pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
34	Adriana R. K. Dupa, ST/ Staf pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
35	Selfina Naibobe, ST.MUP/ Staf pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.

36	Roy S. Haning, ST, MT/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
37	Fredrik Maima, S.Sos/ Staf pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
38	Tarsisius, Langoday, ST/ Staf pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
39	Benediktus Lay/ Staf pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.



40	Hilaria Ursula Vina, A.MD/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
41	Lilian Amalo, SH/ Staf pada Bappeda Prov NTT	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.
42	Karel Lafu Ulus Foenay/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana <i>on grating</i> sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU, menyiapkan tinjauan/review umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi PPMU, mendistribusi kan keputusan-keputusan dari PPMU, ikut bertanggungjawab kepada PPMU.

*Ma.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*  
SEKRETARIS DAERAH,

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014